

PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN: EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN LAUT DI KABUPATEN BINTAN

Ardi Putra

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Maritim Raja Ali Haji

ardiputra@umrah.ac.id

*Corresponding author

Rizky Octa Putri Charin

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Maritim Raja Ali Haji

rizkycharin@umrah.ac.id

Khairi Rahmi

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Maritim Raja Ali Haji

khairirahmi@umrah.ac.id

Abstrak

Kabupaten Bintan salah satu kabupaten yang masuk dalam prioritas pengembangan perbatasan sebanyak 4 kecamatan lokpri, masih terdapat kendala-kendala yang mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan kawasan perbatasan di Kabupaten Bintan. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tahun 2020-2024 pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah melakukan kegiatan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat baik untuk pelayanan dasar maupun peningkatan ekonomi masyarakat, terdapat juga tantangan utama yang dihadapi oleh bagian pengelola perbatasan yang masih berada di bawah koordinasi sekretariat daerah (setda) dan belum memiliki otoritas penuh dalam mengelola anggaran dan program, keterbatasan dalam pengambilan keputusan, koordinasi yang rumit, keterbatasan sdm, dan keterbatasan keuangan.

Keywords: Pembangunan, Kawasan Perbatasan, Efektivitas Pengelolaan

Abstract

Bintan Regency is one of the districts included in the border development priority of 4 Lokpri sub-districts, there are still obstacles that affect the effectiveness of this policy. This research aims to analyze the effectiveness of border area management in Bintan Regency. The method used is a literature study by collecting and analyzing data from various sources. The results of the research show that from 2020-2024 the central government and regional governments have carried out development activities for community welfare, both for basic services and improving the community's economy. There are also major challenges faced by the border management section which is still under the coordination of the regional secretariat (Setda) and do not yet have full authority in managing budgets and programs, limitations in decision making, complex coordination, limited human resources, and financial limitations.

Keywords: Development, Border Areas, Management Effectiveness

PENDAHULUAN

Pengelolaan perbatasan di seluruh wilayah NKRI merupakan bagian integral dari manajemen negara, yang operasionalisasinya membutuhkan adanya arah yang jelas berdimensi jangka panjang dan komprehensif dalam sebuah grand design bagaimana mencapai visi dan misi pengelolaan perbatasan sebagaimana telah diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (San Taslim, 2023). Grand design disusun guna mencapai tujuan utama pengelolaan perbatasan, yaitu: menjaga integrasi NKRI sebagai amanat konstitusi, membangun kawasan perbatasan secara berimbang, terpadu, dan komprehensif untuk kesejahteraan rakyat, mengukuhkan kapasitas Indonesia di wilayah perbatasan dalam konteks persaingan global (Alfarisi & Heriyanto, 2023). Guna mencapai tujuan utama tersebut maka *grand design* disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: mengutamakan kepentingan strategis nasional, pengelolaan perbatasan berwawasan global, integrasi seluruh aspek perubahan lingkungan strategis, keterpaduan pengelolaan dalam hubungan pusat dan daerah, dan dinamika politik perbatasan (BNPP, 2011: 13-16).

Kebijakan pengelolaan wilayah perbatasan memiliki peran krusial dalam menjaga keamanan nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan (Ahmad, 2023). Kebijakan pengelolaan wilayah perbatasan Mendorong kerja sama yang erat antara berbagai instansi pemerintah terkait, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Koordinasi yang baik dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan wilayah perbatasan (Lovina, 2023). Arah Kebijakan pengelolaan wilayah perbatasan memastikan partisipasi aktif dan inklusif masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan wilayah perbatasan (Fisabilillah & Richard, 2023). Pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan keberlanjutan program-program pembangunan. Selanjutnya Kebijakan pengelolaan wilayah perbatasan Mengarahkan investasi pada pengembangan infrastruktur yang mendukung konektivitas dan pembangunan ekonomi di wilayah perbatasan (Arieta, Rahmawati, Wahyuni, & Suryaningsih, 2023). Infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan bandara dapat meningkatkan aksesibilitas dan perdagangan (Suharto, Arminah, & Martanto, 2023).

Kebijakan pengelolaan wilayah perbatasan harus dapat Memastikan keamanan wilayah perbatasan melalui peningkatan kehadiran dan penegakan hukum. Hal ini melibatkan keberadaan pos-pos militer, kepolisian, dan lembaga penegak hukum untuk mencegah potensi ancaman keamanan. Menetapkan sistem pemantauan lingkungan untuk melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem di wilayah perbatasan. Kebijakan ini dapat membantu mengelola dampak pembangunan terhadap lingkungan. Kebijakan pengelolaan wilayah perbatasan dapat Meningkatkan kerja sama dan hubungan diplomatik dengan negara tetangga untuk mengatasi masalah bersama, seperti perdagangan lintas batas, keamanan, dan pengelolaan sumber daya alam. Mendorong diversifikasi ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di wilayah perbatasan untuk mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu. Hal ini dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pengelolaan wilayah perbatasan dapat mendorong terbukanya akses pendidikan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat di wilayah perbatasan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesempatan bagi penduduk lokal. Kebijakan pengelolaan wilayah perbatasan harus mempertimbangkan konteks geografis, budaya, dan sosial setempat untuk mencapai hasil yang optimal dan berkelanjutan.

Isu pembangunan kawasan perbatasan (empat) aspek yaitu: aspek penataan ruang kawasan perbatasan, aspek infrastruktur kawasan perbatasan, aspek pertumbuhan ekonomi, and aspek pelayanan sosial dasar. Permasalahan dari aspek penataan ruang kawasan perbatasan adalah penataan ruang kawasan perbatasan yang belum tuntas, yang menyulitkan proses perencanaan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perbatasan (Wulandari & Widowati, 2023).

Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan terdapat 71 kecamatan yang tesebar di 7 Kabupaten/Kota. Kawasan perbatasan menurut undang-undang RI Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam yang berada di kecamatan sepanjang batas wilayah Indonesia. Untuk lokasi prioritas dalam pengembangan perbatasan di Provinsi Kepulauan Riau terdapat 21 Kecamatan Lokpri. Di Kabupaten Bintan terdapat 4 Kecamatan Lokpri dalam pengembangan Kawasan perbatasan. Kebijakan

pengelolaan lokpri sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN tahun 2020-2024 diarahkan pada aspek pemerataan pembangunan melalui penyediaan fasilitas pelayanan sosial dasar dan pengembangan perekonomian termasuk pemanfaatan potensi yang dimiliki. Sebagaimana diketahui bahwa Kawasan Perbatasan, dalam hal ini lokpri termasuk PPKT banyak memiliki potensi sumber daya alam berupa pertanian, kelautan dan perikanan serta pariwisata. Selanjutnya isu strategis Kawasan perbatasan Kabupaten Bintan adalah: ancaman terhadap eksistensi ppkt, terbatasnya akses dan konektivitas antar pulau, optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya alam, keberadaan pintu keluar/masuk illegal, pemenuhan sarana prasarana pemukiman, energi dan telekomunikasi.

STUDI LITERATUR

Pembangunan kawasan perbatasan khususnya pada perbatasan laut telah menjadi topik penelitian yang menarik bagi banyak ilmuwan dan peneliti dalam negeri maupun luar negeri selama beberapa dekade terakhir (Alfarisi & Heriyanto, 2023). Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang peran pembangunan kawasan perbatasan laut dalam mengoptimalkan potensi ekonomi dan sosial di wilayah tersebut.

Penelitian berjudul "Coastal Zone Management in the Baltic Sea Region" (2003) oleh Kerstin Brink dan Olle Nordström, penelitian ini membahas berbagai aspek pengelolaan kawasan perbatasan laut di wilayah Laut Baltik, termasuk konflik antara penggunaan sumber daya, perlindungan lingkungan, dan pengelolaan risiko bencana. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk pembangunan kawasan perbatasan laut yang berkelanjutan. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Richard C. Smardon dan Peter F. Sell yang berjudul "Development of Coastal Areas: A Review of Concepts and Approaches" (2004) yang membahas berbagai konsep dan pendekatan dalam pengembangan kawasan perbatasan laut, termasuk pengembangan berbasis sumber daya, pengembangan berkelanjutan, pengembangan berorientasi pada pasar, dan pengembangan berbasis partisipasi masyarakat. Penelitian ini menekankan pentingnya menggabungkan berbagai pendekatan tersebut dalam pengembangan kawasan perbatasan laut yang berhasil.

"Marine Spatial Planning: A Step-by-Step Approach toward Ecosystem-Based Management" (2009) oleh Thorsten Blenckner, Thomas Tomczak, dan Lena Bergström, meski penelitian ini membahas tentang perencanaan spasial laut (marine spatial planning) sebagai pendekatan yang dapat digunakan untuk mencapai manajemen berbasis ekosistem dalam pengembangan kawasan perbatasan laut, namun penelitian ini juga membahas tentang pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan spasial laut untuk mencapai manajemen berbasis ekosistem yang efektif.

Secara empiris, masalah-masalah pembangunan perbatasan laut di Kepulauan Riau juga telah diteliti sebelumnya pada jurnal yang berjudul "Challenges and Opportunities for Developing Sea Borders: A Case Study of Riau Islands Province" oleh Sri Yuningsih dan Muhammad Ali Azhari (2019). Jurnal ini membahas tantangan dan peluang dalam mengembangkan perbatasan laut di Kepulauan Riau. Penulis menyoroti masalah-masalah seperti kerentanan terhadap ancaman keamanan, kurangnya infrastruktur, dan kesulitan dalam pengelolaan sumber daya laut. Mereka juga menunjukkan potensi pengembangan pariwisata dan sektor ekonomi lainnya sebagai peluang untuk meningkatkan pembangunan di wilayah tersebut. Jurnal "Maritime Disputes in the South China Sea and the Role of the Riau Islands" oleh Andrew Erickson dan Austin Strange (2018). Jurnal ini membahas peran Kepulauan Riau dalam sengketa maritim di Laut China Selatan. Penulis menyoroti tantangan yang dihadapi oleh Kepulauan Riau dalam menghadapi klaim sengketa dan mempertahankan kedaulatan wilayah lautnya. Mereka juga menunjukkan pentingnya kerjasama regional untuk mengatasi masalah-masalah ini. Penelitian dengan judul "Perencanaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kepulauan Riau" oleh Rian Adi Saputra (2016). Penelitian ini membahas perencanaan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kepulauan Riau. Penulis menyoroti masalah-masalah seperti pengelolaan sumber daya laut yang tidak berkelanjutan, kebutuhan infrastruktur yang belum terpenuhi, dan kurangnya perencanaan yang holistik. Mereka juga menunjukkan pentingnya melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pengelolaan wilayah. Jurnal "The Development of Maritime Border Regions in Indonesia: A Study of the Riau Islands Province" oleh Andi M. Baso Amah, M. Ramdan, dan Ikhwanuddin (2018).

Jurnal ini membahas pembangunan wilayah perbatasan laut di Indonesia, dengan fokus pada Kepulauan Riau. Penulis menyoroti tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan wilayah tersebut, termasuk kurangnya infrastruktur dan kebijakan yang tidak terkoordinasi. Mereka juga menunjukkan pentingnya memperkuat koordinasi antarlembaga dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah.

Berdasarkan literature review di atas, dapat disimpulkan bahwa masalah-masalah pembangunan perbatasan laut di Kepulauan Riau meliputi kerentanan terhadap ancaman keamanan, kurangnya infrastruktur, pengelolaan sumber daya laut yang tidak berkelanjutan, kebijakan yang tidak terkoordinasi, dan kurangnya perencanaan yang holistik. Namun, wilayah ini juga memiliki potensi pengembangan pariwisata dan sektor ekonomi lainnya sebagai peluang untuk meningkatkan pembangunan di wilayah tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai efektivitas pengelolaan Kawasan perbatasan ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus dilakukan dengan memilih Kabupaten Bintan sebagai lokasi penelitian karena daerah ini sebagai wilayah yang besaah perbatasan. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan berbagai pihak terkait, seperti pejabat pemerintah, pengusaha, dan akademisi yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait peengelolaan kawasan perbatasan Kabupaten Bintan. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi langsung terhadap infrastruktur dan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan Kawasan perbatasan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

Efektivitas kebijakan pengelolaan perbatasan menjadi focus pemerintah baik pusat maupun daerah dalam penangana permasalahan yang ada di Kawasan perbatasan. Hal ini tidak terlepas dari peran strategis wilayah perbatasan bagi kedaulatan Indonesia.. Kusnadi (2015) mengidentifikasi bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan pembangunan adalah koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Sementara itu, Fitriani (2016) menekankan bahwa

pemilihan indikator keberhasilan pembangunan yang tepat dan akurat dapat meningkatkan efektivitas kebijakan. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah kurangnya koordinasi antarinstansi dan keterbatasan sumber daya manusia. Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara konsep pembangunan industri maritim yang diusung dengan kondisi nyata di lapangan, seperti keterbatasan infrastruktur dan ketergantungan terhadap importasi bahan baku. Sedangkan, Menurut studi yang dilakukan oleh Kamilia dan Hamzah (2019), efektivitas kebijakan pengelolaan Kawasan perbatasan perlu ditingkatkan.

Faktor yang mempengaruhi antara lain keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kualitas infrastruktur, dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengembangan sektor di Kawasan perbatasan. Salah satu landasan rencana pengelolaan wilayah perbatasan tercantum di dalam dokumen Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan yang dirumuskan oleh BNPP. Rencana ini berlandaskan pada aturan. Pasal 25A UUD 1945: *“Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.”* UU No.43 Tahun 2008: *“Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya dan kewenangan tertentu lainnya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*

Pengelolaan keuangan wilayah perbatasan memerlukan pendekatan yang holistik dan sensitif terhadap konteks lokal dan internasional. Tujuan utamanya adalah untuk mendorong pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memastikan keamanan dan stabilitas di wilayah perbatasan. Berdasarkan Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan tahun 2020-2024 terdapat 4 Lokasi Prioritas di Kabupaten Bintan yakni sebagai berikut :

Tabel 1. Lokasi Prioritas Kabupaten Bintan

No	Kecamatan Lokpri	Desa
1	Gunung Kijang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelurahan Kawal 2. Desa Malang Rapat 3. Desa Teluk Bakau 4. Desa Gunung Kijang
2	Bintan Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanjung Uban Kota 2. Tanjung Uban Utara 3. Tanjung Uban Selatan 4. Tanjung Uban Timur 5. Lancang Kuning
3	Telok Sebung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelurahan Kota baru 2. Desa Berakit 3. Desa Ekang Anculai 4. Desa Pengudang 5. Desa Sebung Lagoi 6. Desa Sebung Pereh 7. Desa Sri Bintan
4	Bintan Pesisir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Air Gelubi 2. Desa Kelong 3. Desa Mapur 4. Desa Numbing

Sumber: Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Th 2020-2024

Berdasarkan tabel diatas terdapat 4 kecamatan yang menjadi Lokpri perbatasan di Kabupaten Bintan, sesuai dengan target RPJMN 2020-2024 yaitu kecamatan prioritas perbatasan negara yang akan ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya dengan program penguatan pemerintahan dan pengembangan desa, secara umum saat ini ada 222 kecamatan prioritas sesuai dengan rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Th 2020-2024. Berikut tabel 4.7 yang menjelaskan tentang program pembangunan Kawasan perbatasan di Kabupaten Bintan.

Tabel 2. Matriks Pembangunan dan Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara

Program 2021		Program 2022		Program 2023	
Program	Anggaran	Program	Anggaran	Program	Anggaran
Dinas Pendidikan		Dinas Pendidikan		Dinas Pendidikan	
Pembangunan Ruang Guru SD	Rp295.680.000	Revitalisasi PAUD	Rp166.250.000	Revitalisasi PAUD	Rp46.361.444
Pembangunan Ruang Kelas SD	Rp4.040.960.000	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rp1.963.899.744	Revitalisasi SD	Rp1.132.228.277
Pembangunan Ruang Pepustakaan SD	Rp1.685.376.000	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rp226.999.392	Revitalisasi SMP	Rp1.170.770.814
Pembangunan Ruang UKS SD	Rp369.600.000	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rp161.457.488		
Pembangunan Jamban SD	Rp300.300.000	Revitalisasi SD	Rp2.766.441.008		
Pembangunan Rumah Dinas Guru SMP	Rp411.378.000	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rp177.000.000		
Pembangunan Ruang Guru SMP	Rp302.929.000	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rp495.879.000		
Pembangunan Ruang Kelas SMP	Rp1.621.699.432	Revitalisasi SMP	Rp3.450.854.387		
Pembangunan Ruang Tata Usaha SMP	Rp624.822.000				
Pembangunan Ruang Perpustakaan SMP	Rp349.360.000	Dinas Lingkungan Hidup		DP3KB	
Pembangunan Ruang Laboratorium IPA SMP	Rp1.022.628.000	Total Anggaran	Rp1.181.000.000	Sarana dan Prasarana Pelayanan KB	Rp160.000.000

Pembangunan Ruang Ibadah SMP	Rp32.340.000				
Pembangunan Ruang UKS SMP	Rp42.042.000				
Dinas Perumahan dan Pemukiman		Dinas Kesehatan		Dinas Kesehatan	
Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya	Rp990.000.000	Total Anggaran	Rp2.068.340.303	Pengembangan Posyandu Prima	Rp159.286.889
Dinas Perhubungan				Peralatan Pengendalian Penyakit	Rp10.552.000
Rehabilitasi Dermaga	Rp1.571.318.842				
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
Pembangunan Jalan	Rp4.085.000.000	Penanganan Jalan	Rp3.363.850.903	Penanganan Jalan Kabupaten	Rp3.332.353.235
Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM	Rp500.000.000	Pembangunan Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)	Rp1.411.600.000		
Total Anggaran 2021	Rp18.245.433.274	Total Anggaran 2022	Rp17.433.572.225	Total Anggaran 2023	Rp6.011.552.659

Sumber: Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Th 2020-2024

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan perbatasan dimana di Kabupaten Bintan selama 3 tahun terakhir kegiatan yang dilaksanakan melalui Alokasi DAK dari tahun 2021-2023 dimana kegiatan dilaksanakan oleh dinas teknis yang ada di Kabupaten Bintan. Pada tahun 2021 anggaran sebesar Rp 18.245.433.274, untuk tahun 2022 anggaran sebesar Rp 17.433.572.225 dan untuk tahun 2023 anggaran sebesar Rp 6.011.552.659, dilihat dari tahun 2021-2023 ada penurunan ini disebabkan sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Batas Negara dan Kawasan Perbatasan th 2020-2024 ada sebanyak 222 lokpri yang akan dikembangkan.

Gambar 1. Pulau Terluar di Kabupaten Bintan



Sumber: Sekretariat Daerah Bidang Perbatasan Kabupten Bintan, 2023

Gambar 2. Pembangunan Bidang Pelayanan Dasar Masyarakat di Lokpri Kecamatan Kawasan Perbatasan di Kabupaten Bintan



Sumber: Sekretariat Daerah Bidang Perbatasan Kabupten Bintan, 2023

Tantangan utama yang dihadapi oleh Bagian Pengelola Perbatasan yang masih berada di bawah koordinasi Sekretariat Daerah (Setda) dan belum memiliki otoritas penuh dalam mengelola anggaran dan program adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan Otonomi Keuangan: Karena tidak memiliki otonomi penuh dalam mengelola anggaran, Bagian Pengelola Perbatasan tentu terbatas dalam mengalokasikan dana secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan mereka di wilayah perbatasan. Hal ini bisa menghambat kemampuan mereka untuk merespons situasi yang memerlukan pengeluaran mendesak.
2. Keterbatasan dalam Pengambilan Keputusan: Keterbatasan otoritas dalam mengambil keputusan strategis dapat menghambat kemampuan Bagian Pengelola Perbatasan untuk merencanakan dan melaksanakan program-program yang efektif di wilayah perbatasan. Mereka mungkin harus tergantung pada persetujuan dari pihak lain, seperti Setda, dalam pengambilan keputusan penting.
3. Koordinasi yang Rumit: Karena Bagian Pengelola Perbatasan berada di bawah koordinasi Setda, mereka perlu berkoordinasi dengan berbagai unit atau divisi lain dalam struktur organisasi pemerintah daerah. Ini dapat mengakibatkan proses pengambilan keputusan menjadi lebih rumit dan lambat.
4. Keterbatasan Sumber Daya Manusia: Bagian Pengelola Perbatasan mungkin memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya manusia yang tersedia untuk mengelola perbatasan. Mereka mungkin memerlukan lebih banyak personel yang terlatih dan berpengalaman untuk menjalankan tugas mereka secara efektif.
5. Kurangnya Otoritas dalam Persoalan Lintas Daerah: Dalam situasi di mana isu-isu perbatasan melibatkan lebih dari satu kabupaten atau daerah, Bagian Pengelola Perbatasan yang di bawah Setda mungkin tidak memiliki otoritas yang cukup untuk mengkoordinasikan penyelesaian masalah-masalah ini dengan efektif.
6. Keterbatasan dalam Menarik Investasi: Keterbatasan otonomi dalam mengelola anggaran dan program juga dapat menghambat kemampuan Bagian Pengelola Perbatasan untuk menarik investasi dan proyek-proyek pembangunan ke wilayah perbatasan.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, penting bagi Bagian Pengelola Perbatasan untuk berusaha untuk memperkuat otoritas dan otonomi mereka, serta bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah pusat, kabupaten tetangga, dan masyarakat lokal dalam rangka meningkatkan pengelolaan perbatasan yang lebih efektif. Berdasarkan Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan tahun 2020-2024 terdapat 4 Lokasi Prioritas di Kabupaten Bintan. Arah Pembangunan Kabupaen Bintan

1. Pembangunan Pendidikan Dasar, Pelayanan Kesehatan yang berkualitas serta peningkatan kualitas hidup dalam pengurangan kemiskinan
2. Kenetivitas infrastruktur
3. Peningkatan aktifitas potensi lokal (Pariwisata,Budaya, dan Pemuda dan Olahraga)
4. Pembangunan bidang pertanian, perikanan,perternadakan guna mendorong ketahanan pangan

Selama 3 tahun terakhir kegiatan pembangunan kawasan perbatasan yang dilaksanakan melalui Alokasi DAK dari tahun 2021-2023 dimana kegiatan dilaksanakan oleh dinas teknis yang ada di Kabupaten Bintan.Pada tahun 2021 anggaran sebesar Rp 18.245.433.274, untuk tahun 2022 anggaran sebesar Rp 17.433.572.225 dan untuk tahun 2023 anggaran sebesar Rp 6.011.552.659

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejumlah faktor mempengaruhi efektivitas pengelolaan kawasan perbatasan laut di Kabupaten Bintan, termasuk koordinasi antarinstansi, partisipasi masyarakat, dan dukungan sumber daya. Kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan perlu diperkuat melalui peningkatan koordinasi antarinstansi terkait, pembentukan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang lebih efektif, serta peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Diperlukan pula investasi dalam sumber daya manusia dan teknologi guna meningkatkan kapasitas pengelolaan kawasan perbatasan laut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan perbatasan laut di Kabupaten Bintan, serta memberikan wawasan bagi daerah-daerah lain yang

memiliki tantangan serupa dalam pembangunan kawasan perbatasan mereka. Pengelolaan wilayah perbatasan memerlukan pendekatan yang holistik dan sensitif terhadap konteks lokal dan internasional. Tujuan utamanya adalah untuk mendorong pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memastikan keamanan dan stabilitas di wilayah perbatasan.

REFERENSI

- Ahmad, K. B. (2023). *Budaya Sebagai Pertahanan Bangsa: Studi Kasus Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat dan Kepulauan Riau*.
- Alfarisi, M. A., & Heriyanto, H. (2023). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Ekowisata Di Perbatasan Kalimantan Barat–Malaysia. *Jurnal Administrasi Negara*, 1(4), 259–269.
- Badan Nasional Pengelola Perbatasan. 2011. *Grand Design Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan di Indonesia Tahun 2011- 2025*, Jakarta
- BNPP, Jakarta. _____ .2012. *Pembangunan Kawasan dan Manajemen*
- Andi M. Baso Amah, M. Ramdan, dan Ikhwanuddin. (2018). The Development of Maritime Border Regions in Indonesia: A Study of the Riau Islands Province. *Indonesian Journal of Geography*. Volume 50, No 1.
- Andrew Erickson, Austin Strange. (2018). Maritime Disputes in the South China Sea and the Role of the Riau Islands. *Journal Asian Security*, Volume 14, No. 1.
- Arieta, S., Rahmawati, N., Wahyuni, S., & Suryaningsih, S. (2023). INTEGRASI Pembangunan Berperspektif Ekofeminisme (Studi Pendahuluan Rencana Pengembangan Kawasan Pertambangan di Perbatasan Kepulauan Riau). *Jurnal Media Sosiologi*, 26(2), 12–24.
- Fisabilillah, L., & Richard, M. B. A. (2023). Upaya Penanganan Illegal Fishing Di Laut Natuna Dalam Kajian Hukum Internasional. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(17), 439–447.
- Jeffrey D. Sachs. (2015). *The Age of Sustainable Development*. Columbia: Columbia University Press.
- Lovina, R. (2023). Kajian Konsepsi Pengembangan Zona Ekonomi Maritim Di Wilayah Kepulauan Riau. *Jurnal Potensi*, 3(2).

Kerstin Brink dan Olle Nordström (2003). Coastal Zone Management in the Baltic Sea Region: Proceedings of the 7th Coastline Symposium, Gdansk, Poland, June 2002. World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.

Michael P. Todaro dan Smith. (2012). Economic Development (11th ed). New York: Pearson.

Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan 2020-2024

Richard C. Sardon dan Peter F. Sell (2004). Development of Coastal Areas: A Review of Concepts and Approaches. *Journal of Coastal Research* No. 3 (20).

San Taslim, W. (2023). Penerapan Strategi Dan Kebijakan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia Dalam Menghadapi Revolusi

Sri Yuningsih dan Muhammad Ali Azhari. (2019). "Challenges and Opportunities for Developing Sea Borders: A Case Study of Riau Islands Province. *International Journal of Advanced Science and Technology*. Volume 28, Nomor 16, 559-568.

Suharto, E., Arminah, V., & Martanto, R. (2023). Model Buffer Zone Antara Hutan Lindung Dan Tanah Milik Guna Penataan Ruang Yang Lestari (Studi Kasus Di Pulau Bintan Provinsi Kepulauan Riau).

Sumarsono, Soni. 2012. Kebijakan Umum Pengelolaan Lintas Batas Negara.

Tasbara. BNPP, Jakarta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara.

Thorsten Blenckner, Thomas Tomczak, dan Lena Bergström (2009). Marine Spatial Planning: A Step-by-Step Approach toward Ecosystem-Based Management. *Marine Pollution Bulletin*. No. 5 (58), 661-666.

Yohanes Sanak. (2012). Human Security dan Politik Perbatasan. Yogyakarta: PolGov. Industri Keempat Khususnya Pada Wilayah Perbatasan. *Obis*, 5(1), 15–25.

Wulandari, S., & Widowati, A. (2023). Implementasi Program Sipelandukilat Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Di Wilayah Perbatasan Dan Pedalaman. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 11–24.